

# Ngireng-Ireng Lestarikan Beragam Budaya

**BANTUL (KR)** - Masyarakat Padukuhan Ngireng-Ireng, Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro Bantul, bersama Sanggar Budaya Cendana Ngireng-Ireng menggelar 'Ngleluri Budhaya Jawi Ngrawat Bumi', Sabtu (2/12). Kegiatan budaya tersebut diisi dengan menggelar tradisi wiwitan, ruwat sukerto dan wayang kulit.

Acara 'Ngleluri Budhaya Jawi Ngrawat Bumi' diawali dengan kirab budaya membawa uba rampe berupa ingkung, gunung beris hasil bumi dari masyarakat Padukuhan Ngireng-Ireng. Mereka mengikuti tradisi ruwat sukerto mengenakan pakaian serba putih

berkeliling kampung. Setelah sampai di lokasi untuk acara 'Ngleluri Budhaya Jawi Ngrawat Bumi' selanjutnya ingkung bersama dengan sesajian lainnya termasuk gunung didoakan pimpinan umat lintas agama dari Islam, Katolik dan Kristen.



Kegiatan tradisi ruwatan sukerto di Ngireng-ireng.

Ketua Sanggar Budaya Cendana Ngireng-Ireng, Y Ari Prabowo, mengata-

kan kegiatan 'Ngleluri Budhaya Ngrawat Bumi' digelar ketiga kalinya

oleh masyarakat Padukuhan Ngireng-Ireng sebagai upaya

KR-Sukro Riyadi

## LOMBA ANGKLUNG GRAND PURI WATER PARK Bawa Masyarakat Sejahtera Lewat Pariwisata

**BANTUL (KR)** - Objek Wisata Grand Puri Water Park bekerjasama dengan Circle Angklung Kids Yogyakarta menggelar event lomba angklung bertajuk 'Gemaruna #3' dengan tema 'Guruku Tersayang', Sabtu (2/12). Ajang yang digelar di Grand Puri Water Park Jalan Parangtritis Sewon Bantul, dibuka Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo didampingi Sales & Marketing Corporate, Grand Puri Water Park Dyah Hendrastuti. Kegiatan tahun ini diikuti 27 peserta TK dari Bantul dan sekitarnya.

Wabup Joko Purnomo mengatakan, lomba angklung Gemaruna ketiga dengan tema 'Guruku Tersayang' merupakan bentuk edukasi perpaduan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Artinya program tersebut membangun sistem belajar mengajar secara arif bijak dan harmonis serta humanis. "Maka dari itu kami Pemerintah Kabupaten Bantul mengucapkan terima kasih kepada manajemen Grand Puri

Waterpark, panitia, dewan juri semuanya yang telah menyelenggarakan event ini. Semoga hal ini membawa satu kebaikan untuk kita dan untuk kemajuan Grand Puri Water Park," ujarnya.

Menurut Joko, tidak kalah penting selama tiga kali panitia mengadakan kegiatan, secara tidak langsung sudah membangun kebersamaan dengan memajukan destinasi wisata. "Karena di Bantul ini ada destinasi wisata kolam renang wisata air yang sangat bagus, sangat baik. Sehingga kepada Bapak Ibu semuanya tidak usah kemana-mana. Tidak usah jauh-jauh keluar kota, tidak usah jauh-jauh ke kota," jelas Joko.

Menurutnya, dalam ajang ini panitia sudah membangun kerja sama dengan sangat baik. "Dan hal tersebut membawa kepentingan besar kita untuk bekerja keras membawa masyarakat Bantul sejahtera melalui pendidikan dan pariwisata," ujarnya.

(Roy)-f



KR-Sukro Riyadi

Wabup Bantul Joko Purnomo didampingi Sales & Marketing Corporate Grand Puri Water Park, Dyah Hendrastuti.

## PEKERJA HARAPKAN JAMINAN KESEHATAN

# Bupati: Kenaikan UMK Sudah Signifikan

**BANTUL (KR)** - Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang diberlakukan di DIY 2024 sudah diumumkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Kamis (30/11). Semua UMK di DIY mengalami kenaikan secara signifikan rata-rata 7 persen. Di Bantul sendiri ada kenaikan sekitar 7,26 persen, sehingga menjadi Rp 2.216.463 atau naik Rp 150.024,18.

Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih, berharap dengan kenaikan yang cukup signifikan di atas rata-rata nasional ini maka produktivitas pekerja maupun pengusaha akan semakin baik dan bisa bersinergi yang lebih erat.

Pengusaha dan pekerja bisa bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul. Menurut Bupati, penetapan UMK ini sudah mempertimbangkan banyak hal yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi dan ditambah konstanta atau alfa yang merupakan gambaran kontribusi pekerja.

"Jadi pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi, dikalikan konstanta 0,3 yang merupakan kontribusi pekerja sehingga

kenaikan harga sudah terakomodir di dalam angka UMK di Kabupaten Bantul. Jadi nilainya cukup signifikan dan kenaikan UMK di Bantul tahun ini termasuk kenaikan yang lebih besar dibanding kenaikan UMK di Bantul pada tahun sebelumnya," ungkap Abdul Halim.

Menurutnya, UMK harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan riil karyawan atau kemampuan pengusaha, sehingga angka UMK menjamin keberlangsungannya usaha. "Sebab kalau upah terlalu tinggi itu tidak ada pengusaha dan kalau upah terlalu rendah tidak ada pekerja. Maka pemerintah membuat satu formula yang kemudian diikuti dan dirumuskan dengan kebutuhan hidup di daerah masing-masing. Di DIY kenaikan UMK termasuk tinggi yakni secara kumulatif sekitar 7,27 persen, di Bantul sendiri sekitar 7,26 persen," imbuhnya.

Menanggapi usulan pekerja tentang permintaan jaminan pendidikan dan jaminan kesehatan bagi kaum pekerja, menurut Bupati, pekerja di Bantul sudah dikafer de-



KR- Judiman

Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih menanggapi penetapan UMK Bantul.

ngan BPJS 98,5 persen, tinggal 1,5 persen yang belum.

Sedangkan untuk jaminan pendidikan hingga di tingkat SMP negeri sudah digratiskan. Sekolah yang swasta ada Bosda dan Bosnas agar bisa memberikan keringan yang di sekolah swasta. Bagi sekolah swasta juga diminta agar tidak menuntut iuran sekolah yang melampaui kewajaran.

Sementara Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSP-SI) Bantul Fardhanatun mengatakan, terkait kenaikan UMK pihaknya maupun Asosiasi Pengu-

saha Indonesia (Apindo) Bantul sama-sama sudah menerima kenaikan UMK yang diputuskan Gubernur DIY. Karena sudah ada formula yang disepakati bersama oleh Apindo, KSPSI, pemerintah maupun akademisi.

Tapi KSPSI meminta kepada pemerintah, ada jaminan kesehatan dan pendidikan gratis bagi anak kaum pekerja sampai jenjang perguruan tinggi atau sarjana. "Untuk jaminan sosial tersebut juga berlaku bagi pekerja PKWT, PKWTT maupun outsourcing," pungkas Fardhanatun.

(Jdm)-f

# OPERASI PEREDARAN BARANG KENA CUKAI

## Satpol PP Bantul Menyasar Penjual Rokok Ilegal

**BANTUL (KR)** - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul menggalakkan operasi peredaran barang kena cukai, yang dilakukan secara gabungan bersama dengan instansi terkait, termasuk petugas Bea Cukai.

Peredaran barang kena cukai merupakan tindakan pelanggaran Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Operasi menyasar warung-warung kelontong yang mengedarkan atau menjual rokok tanpa cukai. Di sejumlah warung petugas berhasil menyita ribuan batang rokok tidak bercukai dan ilegal. Selanjutnya oleh petugas bea cukai dilakukan penyitaan barang bukti, pemberkasan administrasi dan diberikan sanksi berupa denda yang dibayar oleh penjual.

Rokok ilegal atau tanpa cukai hasil operasi gabungan selanjutnya disita kantor bea cukai untuk dimusnahkan.

Dengan ditemukannya peredaran ribuan rokok tanpa cukai di sejumlah warung wilayah Bantul tersebut, petugas Satpol PP Bantul mengimbau kepada penjual atau pemilik toko/warung untuk tidak menerima pasokan rokok yang tidak bercukai dan ilegal karena dapat

dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Kepada pemilik warung yang menjual rokok tanpa cukai juga diminta, jika ada sales yang mendistribusikan rokok tanpa cukai agar segera menginformasikan ke Satpol PP Bantul.

"Ternyata banyak juga warung di wilayah Bantul yang menjual rokok tanpa cukai, padahal sanksi atau dendanya cukup berat," papar Kepala Seksi Penindakan dan Penegakan Perundang-Perundangan Daerah Satpol PP Bantul, Sri Hartati SH.

Menurut Sri Hartati, atas pelanggaran ketentuan berupa pemalsuan pita cukai rokok dikenai sanksi pidana penjara selama 1 hingga 8 tahun dan pidana denda 3 kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan.

Selain melakukan operasi gabungan, petugas juga memberikan edukasi kepada para pedagang hasil tembakau tentang ketentuan cukai. Diantaranya tentang ciri-ciri rokok ilegal yang harus diketahui dan diwaspadai.

"Makanya, dengan digalakkannya operasi gabungan ini, kami harapkan para pedagang hasil tembakau bisa memahami ketentuan di

bidang cukai. Kami juga mengimbau agar tidak menjual hasil tembakau yang melanggar ketentuan atau peraturan," tegas Sri Hartati.

Operasi gabungan ini akan terus digalakkan untuk menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Bantul. Juga sebagai bentuk pengawasan Satpol PP Bantul bersama Tim, yang dibentuk sesuai Keputusan Bupati Bantul No 12 Tahun 2023, tentang Pembentukan Tim pengendalian peredaran cukai tembakau pelaksanaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2023.

Menurut Sri Hartati, tingginya minat konsumen terhadap rokok dengan harga murah menarik pedagang atau pemilik warung untuk menjual rokok ilegal.

"Selain harga yang murah rokok ilegal mudah didapatkan oleh pedagang dengan sistem jual putus melalui media online, sehingga kami kesulitan mengungkapkan kasus rokok ilegal seperti ini ke distributor," imbuh Sri Hartati.

Tetapi dengan berbekal informasi dari intelijen internal, kami menindaklanjuti dengan melakukan operasi gabungan. (Jdm)



Kegiatan operasi gabungan di lokasi penjual rokok ilegal di wilayah Bantul

